

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni Sosialisasikan Peraturan Daerah Tentang Rembug Desa dan Kelurahan :



Elly Wahyuni menjelaskan cara mencegah potensi terjadinya gesekan Konflik menjadi topik pembahasan saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosper) di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, beberapa waktu lalu."Alhamdulillah, Saya telah menggelar sosper di Kota Metro, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar," ujarnya. Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini memilih Peraturan Daerah (Perda) Rembug Desa dan Kelurahan untuk di sosialisasikan di Kota Metro. Alasannya agar potensi terjadinya gesekan konflik di tengah masyarakat dapat diminimalisir dengan pengetahuan regulasi terkait hal tersebut. Di dalam Perda ini mendorong masyarakat agar dapat menyelesaikan konflik dengan mengedepankan musyawarah," kata dia, Dengan melibatkan pamong dan balai desa setempat, masyarakat diharap

dapat menyelesaikan gesekan konflik yang terjadi agar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat tidak meluas.



"Kalau konflik sudah meluas, tentu hal tersebut sulit untuk dikendalikan, maka kehadiran Perda ini masyarakat diminta untuk melibatkan pamong dan pihak desa," ungkapnya. Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung ini mendorong agar masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik. Dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai butir Pancasila seperti menerima perbedaan, dan saling gotong royong. "Saya berharap agar masyarakat dapat mencegah potensi terjadinya konflik, dan dapat menyelesaikan konflik secara bijak," pungkasnya. Negara Indonesia mempunyai semboyan yakni Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda tetapi tetap satu, dengan semboyan tersebut menandakan bahwasanya negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keanekaragaman penduduk. Bangsa Indonesia juga adalah bangsa yang memiliki penduduk dengan keberagaman suku budaya serta agama.



Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung ini lanjut menjelaskan hal tersebut juga menjadi indikasi kongkrik bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan sebagai negara dengan nomor urut empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat.

Negara Indonesia terdapat beberapa agama yang diperbolehkan untuk dianut hal inilah yang menjadikan Indonesia semakin pluralistik diantara agama yang boleh dianut di Indonesia yakni Muslim dengan jumlah sekitar 87,21%, Kristen Protestan berjumlah 6,04%, Katolik berjumlah 3,58%, Hindu berjumlah 1,83%, dan Budha berjumlah 1,03% sehingga dalam Undang-Undang dasar di aminkan bahwasanya negara menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagaimana dinyatakan dengan jelas pada sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa.

Ahmad Iswan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Sosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan :



Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PAN Ahmad Iswan A. Caya melakukan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP & WK) di Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Kegiatan yang dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Dalam paparannya, Iswan mengatakan kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung. Dengan tujuan yang ingin kami capai adalah dengan adanya sosialisasi ini masyarakat di harapkan mampu menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air,” ujarnya. Sosialisasi ini penting dilakukan Mengingat saat ini di negara sedang marak aksi terorisme dan paham radikalisme di tengah masyarakat.

Menurutnya hal itu terjadi karena kurang pemahamannya terkait wawasan kebangsaan dan semangat cinta tanah air dan pancasila.



Dengan adanya sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan kegiatan ini dapat mewujudkan rasa cinta tanah air serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. “Mari kita bersama sama jaga keharmonisan kita dalam bermasyarakat dan cinta tanah air dapat di wujudkan dengan kita saling toleransi antar tetangga lingkungan dan agama. Melihat kondisi masyarakat yang begitu beragam memicu terjadinya perbedaan pendapat antara warga tersebut, perbedaan pendapat yang terjadi memicu sentimenitas serta mempengaruhi kerukunan dalam kehidupan sosial masyarakat, hal ini tentu tidak bisa dibiarkan dikarenakan memicu terjadinya perpecahan, maka perlu peran serta oleh pihak yang berwenang dalam hal ini aperatur desa untuk menengahi permasalahan yang terjadi pada warga tersebut, tak hanya demikian dalam agama Islam pun dianjurkan untuk menjaga kerukunan satu sama lain seperti yang tertera dalam firman Allah dalam Al-quran.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung Kostiana Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung :



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memiliki beberapa program yang menyentuh langsung ke masyarakat yaitu salah satunya sosialisasi tentang peraturan daerah untuk itu perlu menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung. Ketua Fraksi PDIP menerangkan dan menyampaikan peran Pemerintah juga penting untuk dapat menjaga keamanan masyarakat dengan edukasi yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam mencegah konflik. “Sosialisasi ini kita lakukan supaya dapat menjaga keamanan masyarakat untuk menyelesaikan masalah memakai jalur musyawarah mufakat, supaya konflik-konflik kecil yang terjadi di masyarakat tidak perlu menempuh jalur hukum,” ungkap Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Lampung.



Kegiatan yang dihadiri oleh babinsa, bhabinkamtibmas, aparat desa yang meliputi rt, ketua lingkungan dan masyarakat sekitar. Bertempat di Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandarlampung Provinsi Lampung. Bersama Suyatno (Pur) Danramil dan juga AKP Basri Dina (Pur) anggota Ditbinmad Polda Lampung yang menjadi narasumber dikegiatan tersebut. Hendra salah satu masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung mengapresiasi kegiatan tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menjelaskan dengan adanya sosialisasi ini di harapkan masyarakat mengetahui tentang adanya payung hukum yang mengatur pencegahan konflik di tingkat desa dan kelurahan meskipun sebelum Perda tersebut disosialisasikan masyarakat sudah menerapkannya dalam menjaga hubungan di antara masyarakat yaitu dengan peran aktif masyarakat dalam keanggotaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Anggota DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas Sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolajaran :



Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menjelaskan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi sarana pemerintah dalam memperhatikan lebih serius kepada insan olahraga, baik olahraga prestasi maupun olahraga kemasyarakatan selain mawadahi prestasi olahraga masyarakat Perda tersebut juga harus jadi payung hukum dalam mengelola terkait komitmen atlet, jangan sampai ada jual beli atlet. Undang-undang Nomor : 03 Tahun 2005 tentang sistem Keolajaran Nasional ini mengatur mengenai :

1. Dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip;
2. Hak dan kewajiban;
3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

4. Ruang lingkup olahraga;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
6. Prasarana olahraga dan sarana olahraga;
7. Pendanaan keolahragaan.

Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.



Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olah raga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat. Sistem Keolahragaan Nasional diatur dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005. Sistem Keolahragaan Nasional didefinisikan sebagai keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan.



Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan keolahragaan nasional untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di harapkan menjadi Payung Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan bidang olahraga sebagai salah kegiatan yang dapat mengharumkan nama Daerah khususnya untuk Provinsi Lampung.

DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung Gelar Musrembang Provinsi Lampung Tahun 2024 :



Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay memberikan sambutan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Pada Hari Selasa 30 April 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung. Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2024 dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyatakan, Forum Musrenbang ini menjadi penting untuk berperan merumuskan seberapa besar dampak dari perencanaan dapat bermanfaat bagi masyarakat selain itu perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan nasional.



Musrenbang tahun ini mengangkat tema, “Memperkuat Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Lampung Sejahtera, maju, merata dan berkelanjutan (SMART) 2045”. Melalui rangkaian dan proses Musrenbang diharapkan tercipta keselarasan antara kemampuan dan kebutuhan dari seluruh pelaku pembangunan, sehingga dapat dirumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan prioritas dan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Musrenbang ini menjadikan satu kesatuan agar desainnya di dalam membangun per/tahun anggaran dapat terwujud dengan baik, tidak lepas dari perencanaan dan tata kelola bagaimana

kemampuan pemimpin sebagai Pilot yang mengusung seluruh sumber daya pembangunan dapat mengambil tindakan strategis menembus seluruh rintangan tantangan untuk tujuan yang lebih maju, lebih baik dan bermanfaat.



Dalam kesempatan tersebut Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan penghargaan Terbaik 1 dalam Katagori Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 tingkat Kabupaten yang diserahkan langsung Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Kepada Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Penghargaan tersebut dberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam perencanaan, pelaksanaan, inovasi pembangunan, serta pencapaian target-target Pembangunan. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengucapkan rasa syukurnya karena pada pelaksanaan musrenbang tahun ini, Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten dengan Penghargaan pembangunan daerah terbaik. "Alhamdulillah saat ini

pembangunan telah berjalan dengan baik dan kedepan bersama seluruh unsur yang ada di Lampung Tengah bahu membahu akan lebih kita tingkatkan bersama guna mewujudkan Lampung Tengah yang berjaya.



Musrenbang ini sebelumnya didahului dengan diskusi public yang menghadirkan Narasumber Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Yopi, Kepala BI Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani dan Wakil Ketua Bidang UMKM Kadin Lampung, Romi Junanto Utama.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan kegiatan rutin agenda Provinsi Lampung yang merupakan tolak ukur atau barometer dalam Pembangunan daerah khususnya untuk wilayah Provinsi Lampung.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Yusirwan menggelar Sosialisasi Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersama mahasiswa-mahasiswi di Kota Bandar Lampung :



Yusirwan SE., MH Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersama mahasiswa-mahasiswi Bandar Lampung bertempat di Aula DM Resto, Jl. Arief Rahman Hakim, Kota Bandar Lampung. “Kegiatan ini dilakukan bersama penerus muda bangsa tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dimana saat ini mulai terkikis nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi informasi maka dari itu kita gelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman dasar bagaimana menjaga ketahanan NKRI.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan dengan adanya sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswi musuh terbesar dari penerus muda bangsa adalah kurang mengertinya tentang pemahaman ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan. “Yang menjadi musuh penerus muda bangsa selain radikalisme di perkembangan teknologi informasi adalah dirinya sendiri, dimana kurangnya memahami tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.



Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, diharapkan dengan sosialisasi ini dapat merubah pola pikir mahasiswa dan mahasiswi khususnya dikota Bandar Lampung.

